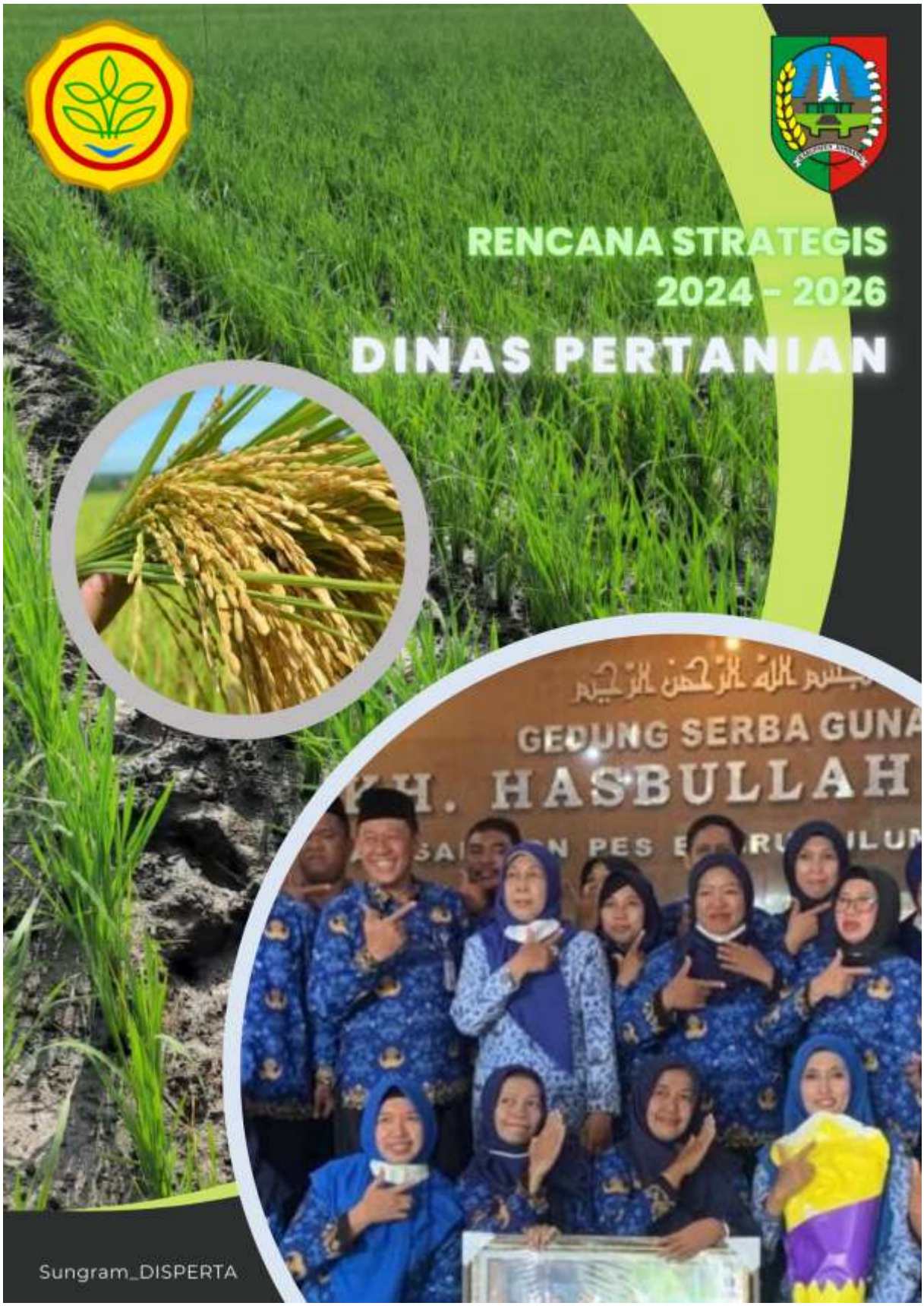
RENCANA STRATEGIS
2024 - 2026
DINAS PERTANIAN
GEDUNG SERBA GUNA
H. HASBULLAH
Sungram_DISPERTA

KATA PENGANTAR

Mendasar pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana hal tersebut berimplikasi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang Bupatinya habis masa jabatan pada tahun 2023. Sesuai intruksi diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra) meliputi semua Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang tersusun dari hasil serangkaian proses evaluasi dan perencanaan pembangunan pertanian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Jombang 2024-2026 dengan tema pembangunan kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 "Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis".

Dokumen Renstra ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dan panduan dalam penentuan langkah kebijakan pembangunan pertanian selama periode 3 (tiga) tahun kedepan. Serta penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Pada penyusunan Renstra tahun 2024-2026 mendasar pada Instruksi Menteri Dalam negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok Fungsi Dinas Pertanian kabupaten Jombang, Dokumen ini sebagai acuan untuk meningkatkan PDRB sektor unggulan melalui sub katagori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang merupakan tujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam Rencana Strategis tahun 2024-2026.

Uraian dari setiap pembahasan dalam dokumen ini tentunya belum menggambarkan perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang. Namun dalam penyusunan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melaksanakan fungsi

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat disusun, yang selanjutnya akan d 1igunakan sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura di Kabupaten Jombang.

Jombang, 6 April 2023
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG

Ir. MUCH. RONY, MM.
NIP. 19670919 199203 1 006

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.4 Konsumen Pelayanan 36
a. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberi Pelayanan 36
b. Dukungan BUMD 36
c. Kerjasama 37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 39
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah 39
3.2 Isu-isu Strategis 43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 52
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 52
4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah 65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 82
7.2 Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui indikator Kinerja Kunci 90
BAB VIII PENUTUP 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Pertanian. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Pertanian yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Renstra Dinas Pertanian ini menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang, di mana Renstra menjadi pedoman yang memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang berdampak tidak langsung dalam penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain juga telah memiliki korelasi positif yang kuat dengan sektor pertanian.

Pembangunan pertanian adalah merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, harus menyusun Renstra untuk menjaga arah bagi tercapainya Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang dimana dalam perencanaannya tanpa adanya Visi Misi Bupati disebabkan kepala daerah Kabupaten Jombang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Renstra Dinas Pertanian 2024-2026, selain disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana pasal 201 ayat (3), sesuai amanah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, juga dalam rangka penyesuaian terhadap Permendari Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Renstra ini memuat program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra. Dalam penyusunannya, berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang

lain dan bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)

   Perencanaan pembangunan skala nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPN dan perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rentra Dinas Pertanian yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional.
2. Rencana Strategis Kementerian Pertanian

   Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian pertanian ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.
3. Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

   Renstra propinsi Jawa Timur adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian Jombang agar selaras dengan arah Pertanian di provinsi Jawa Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra OPD agar dalam pembangunan Pertanian bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD
5. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Derivasi dari Renstra Dinas Pertanian berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Detail hubungan bisa dijelaskan sebagai berikut.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

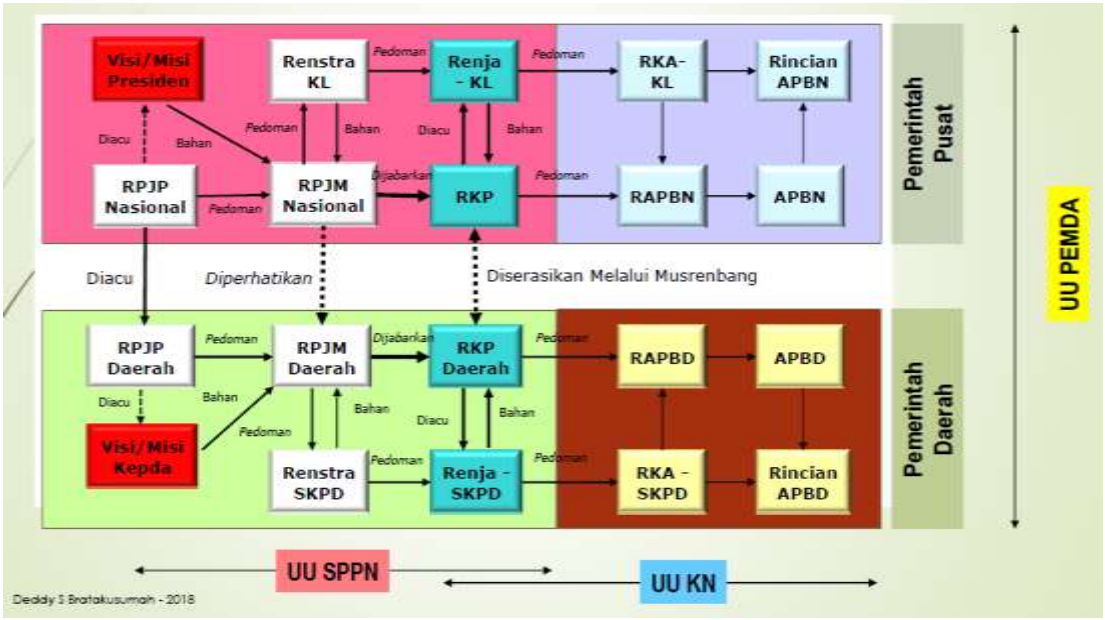

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang, 2018

1.2. Landasan Hukum

Landasan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Keuangan Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022.
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahunn 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041.
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai penganti dari visi dan misi Kepala Daerah karena masa jabatan yang telah berakhir pada tahun 2023 dan rencana pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum kepala daerah secara serempak pada tahun 2024.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022. Dinas Pertanian Menyusun Rencana Strategis yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan pertanian dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam menentukan prioritas program/ kegiatan/ subkegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya;

3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Pertanian;
4. Mendukung seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 2024 sampai dengan 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Konsumen Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Mitra Perangkat daerah
  - b. Kerjasama

III. PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Isu-isu Strategi

IV. TUJUAN DAN SASARAN
- 7.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026
- 7.4 Cascading kinerja Perangkat Daerah

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian.

Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Daerah Kabupaten Jombang dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan mengacu pada restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang Pertanian.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tugas Dinas Pertanian adalah "Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanian". Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;

e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian;
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan tugas fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pertanian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
h. Pengelolaan aset;
i. Pengelolaan kearsipan;
j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Dinas;
m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pertanian;
f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Pertanian;

g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;
i. Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas..

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui optimalisasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
b. Penyusunan peta potensi pengembangan komoditas utama;
c. Penyusunan target, pemantauan, analisa dan evaluasi perkembangan luas tanam dan panen tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
d. Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani/ penyuluhan;

e. Fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
f. Fasilitasi sarana prasarana penyuluhan;
g. Penyediaan rakitan teknologi budidaya tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura tepat guna dan spesifik lokasi;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian;
i. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan fungsi bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Hortikultura;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

4. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang sarana prasarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui pendayagunaan lahan, air, prasarana, sarana dan alat mesin pertanian;
b. Penyusunan peta Pengembangan potensi sarana, prasarana, dan alat mesin pertanian;
c. Fasilitasi Penyediaan dan pengawasan penggunaan pupuk, bibit/benih, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
d. Fasilitasi Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian/Penyuluhan;
e. Fasilitasi penyediaan alat mesin, sarana dan prasarana pertanian;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
g. Penyusunan peta dan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
h. Penyusunan standart operasional prosedur (SOP) pelaksanaan fungsi lingkup bidang sarana dan prasarana;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pertanian.

5. Bidang Perlindungan, Pasca Panen Dan Pemasaran Tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura

Bidang perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang perlindungan, pasca panen dan pemasaran tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan pengendalian kehilangan hasil (losses) akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana pertanian;
b. Perumusan kebijakan Pemasaran dan Perizinan Usaha Pertanian;
c. Perumusan kebijakan pasca panen, asuransi dan bencana pertanian;
d. Penyusunan peta serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana pertanian melalui pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
e. Fasilitasi penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
f. Fasilitasi Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan bencana pertanian;
g. pasca panen, asuransi dan pencegahan/ penanggulangan bencana pertanian;
h. Fasilitasi pemasaran dan pembinaan perizinan usaha pertanian;
i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha tani dan perlindungan tanaman;
j. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan fungsi lingkup bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertaniann.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

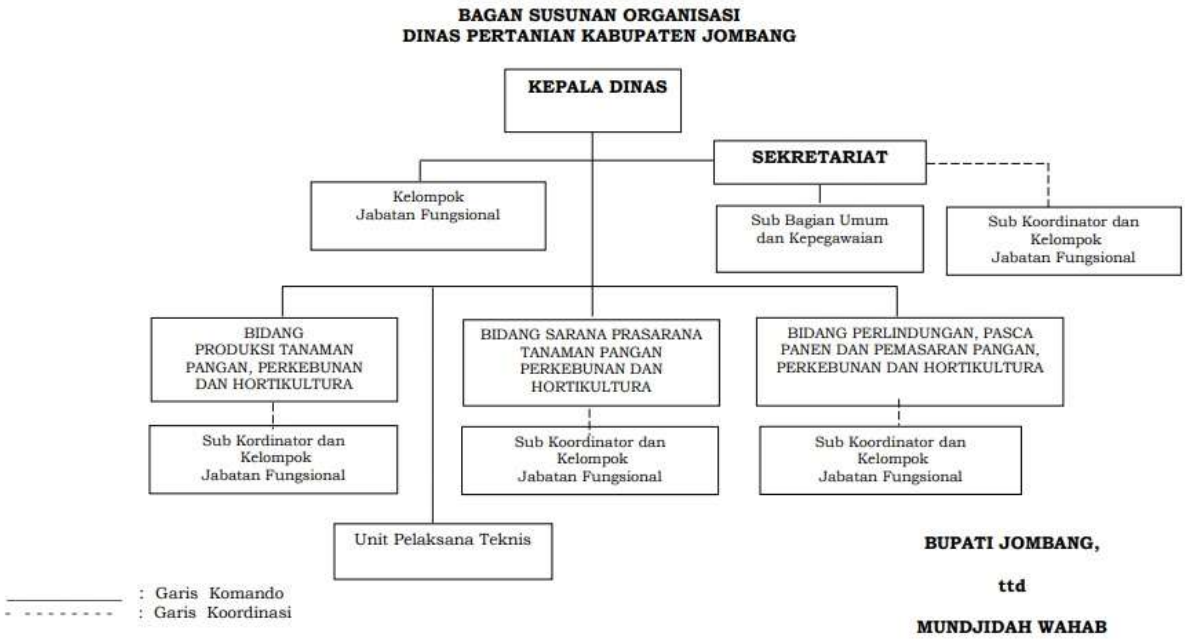

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang efektif, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jombang perlu membuat tata kerja OPD. Tata kerja ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Adapun tata kerja Dinas Pertanian sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

2. Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
3. Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pemangku Jabatan Struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

a. Sumber Daya Manusia

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 154 personil ASN.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan II sebanyak 11 orang, Golongan III sebanyak 57 orang, dan Golongan IV sebanyak 13 orang, Golongan V sebanyak 14 orang, Golongan VII sebanyak 7 orang, Golongan IX sebanyak 44 orang, dan Golongan X sebanyak 1 orang. (Tabel 2.1).

Tabel 2.1

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2023

No	Golongan	Jumlah Pegawai ASN
1	Golongan I	0
2	Golongan II	11
3	Golongan III	57
4	Golongan IV	13
5	Golongan V	14
6	Golongan VII	7
7	Golongan IX	44
8	Golongan X	1
Jumlah		**147**

Selain itu jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berpendidikan Magister (S2) 11 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 86 orang, berpendidikan Diploma (D4) sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 6 orang dan berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 29 orang. Selain itu, terdapat pegawai dengan status honorer daerah sebanyak 31orang. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Komposisi Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai Honorer
1	S3	-	-
2	S2	11	-
3	S1	86	16
4	D4	1	-
5	D3	6	-
6	D2	-	-
7	D1	-	-

8	SMA sederajat	12	12
9	SMP sederajat	-	3
10	SD sederajat	-	-
11	Tidak sekolah	-	-
Jumlah		116	31

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2023

b. Asset/modal

Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan pusat kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melayani masyarakat. Dalam melayani masyarakat Dinas Pertanian Kabupaten Jombang membutuhkan sarana dan prasaran guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah dilengkapi asset/modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayan. Berikut adalah asset/modal Dinas Pertanian Kabupaten Jombang beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat:

Tabel 2.3

Asset/Modal Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	7		
2	Tanah Bang. Pembibitan	1	1		
3	Tanah Kebun	2	2		
4	Kebun Pembibitan	1	1		
5	Stationary Compressor	1	1		
6	Pompa Lainnya	1	1		
7	Pompa Air	27	27		
8	Station Wagon	4	4		
9	Pick Up	3	3		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
10	Sepeda Motor	49	49		
11	Mesin Kompresor	1	1		
12	Perkakas Bengkel Listrik	13	13		
13	Global Positioning System	3	3		
14	Air Conditioning Unit	5	5		
15	Alat Pengolahan Tanah Lainnya	16	16		
16	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya	30	30		
17	Alat Pasca Panen Lainnya	2	2		
18	Penyemprot Mesin	8	8		
19	Penyemprot Tangan	13	13		
20	Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya	12	12		
21	Alat Pengering (dreyer)	1	1		
22	Almari Besi/Metal	1	1		
23	Rak Besi / Metal	3	3		
24	Rak Kayu	2	2		
25	Brandkas	1	1		
26	Lemari Kaca	7	7		
27	Alat Penyimpanan Lainnya	1	1		
28	Alat Penghancur Kertas	2	2		
29	White Board	12	12		
30	Peta	1	1		
31	Lemari Kayu	45	45		
32	Meja Kayu/ rotan	70	70		
33	Kursi Kayu / Rotan	27	27		
34	Meja Rapat	46	46		
35	Meja Tulis	60	60		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
36	Kursi Rapat	263	263		
37	Kursi Putar	5	5		
38	Kursi Biasa	35	35		
39	Meja Komputer	3	3		
40	Meubelair Lainnya	7	7		
41	Korden	2	2		
42	M. Pemotong Rumput	13	13		
43	AC Split	7	7		
44	Kipas Angin	6	6		
45	Tabung Gas	2	2		
46	Televisi	3	3		
47	Sound system	5	5		
48	Megaphone	7	7		
49	Komputer Unit / Jaringan Lainnya	7	7		
50	P.C Unit	11	11		
51	Lap top	25	25		
52	Note Book	52	52		
53	Personal Komputer Lainnya	1	1		
54	Printer	62	62		
55	Monitor	4	4		
56	Peralatan Personal Komp. Lainnya	3	3		
57	Peralatan Jaringan Lainnya	1	1		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3		
61	Meja Kerja Pejabat	6	6		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
62	Meja Rapat Pejabat Eselon III	4	4		
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
64	Camera + Attachment	10	10		
65	Proyektor + Attachment	25	25		
66	Telephone Hybrid	1	1		
67	Unintemuptible P.S(Ups)	7	7		
68	Camera Electric	4	4		
69	Megaphone	3	3		
70	Telephone (Pabx)	8	8		
71	Automatic Burette	1	1		
72	Sieve	1	1		
73	Autoclave	1	1		
74	Hydrometer	3	3		
75	Destilator	1	1		
76	Haemocytometer	1	1		
77	Mikroskop Binokuler	1	1		
78	Exhaust Fan	4	4		
79	Air Compresos	1	1		
80	Alat Pemadam Kebakaran	5	5		
81	Grinder	1	1		
82	Meja Kerja	10	10		
83	Tabung Detruksi	18	18		
84	Gelas Ukur	10	10		
85	Refrigerator/Freezer	1	1		
86	Gedung Kantor Permanen	9	8	1	
87	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	10	10		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
88	Pagar	8	8		
89	Banguna Gudang Lainnya	1	1		
90	Bangunan gedung Tempat Kerja	3	3		
91	Inst.Grd.Distri.Kap.Kecil	1	1		
92	Inst.Grd.Distri.Kap.Sedang	1	1		
93	Instalasi Gardi Listrik Distrbusi Lainnya	3	3		
94	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya	1	1		
95	Jrn.Dstr.Teg.Dibawah 1 K	1	1		
96	Jartel Diatas tnh Kap.Kec	1	1		
97	Peta Lokasi	1	1		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, September 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian merupakan gambaran hasil pelaksanaan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan selama periode 2018-2023. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah mengembangkan aplikasi dibidang pelayanan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat petani diseluruh Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok (Poktan) tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Terdapat 1220 Poktan dan 306 Gapoktan di kabupaten Jombang, guna peningkatan pelayanan kepada petani, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengembangkan pelayanan berbasis sistem informasi diantaranya:

a. E-TRAKTOR (Tracking dan Monitor)

   Aplikasi berbasis online (website) dan Android yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian dalam rangka mempermudah pelaksanaan manajemen informasi mengenai kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan di kabupaten Jombang. Website http://traktor.pertanian.jombangkab.go.id ,

pada android pdapat didownload aplikasi (apk) Traktor.

- Aplikasi ini bertujuan untuk memodernisasi penyusunan identifikasi potensi wilayah, program, dan rencana kerja prnyuluh yang proaktif, professional, kreatif dan inovatif. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan budaya nilai dan prilaku kerja, penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme dan control kerja yang efektif serta meningkatkan mutu layanan administrasi, dan mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian.
- Manfaat Menyediakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan kordinasi pekerjaan diinternal dinas pertanian. Menyediakan fasilitas untuk melaporkan hasil analisa identifikasi potensi wilayah, programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian. Menyediakan fasilitas untuk mempermudah pembuatan dan pengiriman bukti pelaksanaan tugas pokok fungsi penyuluh. Meningkatkan efisiensi kerja dengan penerapan Online Document yang mendukung konsep paperless. Mampu berfungsi sebagai media center yang dapat di kelola dengan mudah untuk menyimpan data sebagai berikut: Laporan Indikator Kinerja Individu (IKI), Pengukuran dan Kinerja Tribulan (KURJA), Perjanjian Kinerja dan Realisasi Kinerja

b. Konsultasi Pengaduan, aplikasi ini menggunakan media sosial untuk menyerap pengaduan dari masyarakat baik Instagram, facebook dan e-mail pada Dinas Pertanian. Memuat berbagai macam keluhan petani seperti penanganan organisme penganggu tanaman, penanganan hama, sarana prasarana pertanian yang belum baik, perlunya peningkatan kapasitas petani melalui sekolah lapang, dan lain sebagainya.

Peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat dilihat juga melalui matrik 2024-2026 pada table berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Laju pertumbuhan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura					Persen		N/A	N/A	N/A	N/A	0,15	46.948.342.667	0,20	52.833.470.663	0,25	62.913.767.912
		Meningkatnya Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura			Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	26.065.156.562	1,10	28.170.971.663	1,20	34.564.617.412
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan mekanisasi pertanian	Persen	N/A	N/A		N/A	N/A	22,81	11.129.125.900	23,04	12.798.494.785	0,23	14.718.269.003
				Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan Alsintan	Persen	N/A	0	N/A	0	N/A	0,47	11.129.125.900	0,47	12.798.494.785	0,48	14.718.269.003
					Persentase poktan yang terfasilitasi pupuk bersubsidi	Persen	N/A	N/A		N/A		1,00		1,00		1,00	
				Sub. Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.380.142.000	4	7.337.163.300	4	8.437.737.795

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	4.748.983.900	3	5.461.331.485	3	6.280.531.208
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Nilai Indeks Pertanaman (IP)**	**Indeks Pertanaman (IP)**	**N/A**	**217**	**N/A**	**226,10**	**N/A**	**227,40**	**4.871.101.500**	**229**	**6.144.278.225**	**230**	**9.285.919.959**
				Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase kecamatan yang memiliki database prasarana pertanian**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**24**	**99.601.500**	**29**	**457.053.225**	**33**	**1.915.611.209**
				Sub. Keg. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.990.000	3	400.000.000	18	1.850.000.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.611.500	2	57.053.225	2	65.611.209
				Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase JITUT dalam kondisi baik**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**31**	**4.771.500.000**	**31**	**5.687.225.000**	**31**	**7.370.308.750**
					Persentase JUT dalam kondisi baik	**Persen**	**N/A**	**22**		**27**		**30**		**32**		**33**	
				Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.129.225.000	19	1.298.608.750	20	1.493.400.063
				Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.642.275.000	15	4.188.616.250	18	4.816.908.688

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA 2019 K	2019 Rp	2020 K	2020 Rp	2021 K	2021 Rp	2022 K	2022 Rp	2023 K	2023 Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	425.000.000	7	500.000.000
				Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	200.000.000	16	1.060.000.000
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Kehilangan hasil (losses)	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1.028.361.300	0	1.540.000.000	0	1.800.000.000
				Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT				N/A		N/A		1.028.361.300		1.540.000.000		1.800.000.000
					Ringan	Persen	N/A	N/A		N/A		1		1		1	
					Sedang	Persen	N/A	N/A		N/A		0		0		0	
					Berat	Persen	N/A	N/A		N/A		0		0		0	
					Puso	Persen	N/A	N/A		N/A		0		0		0	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.017.621.300	7.580	1.400.000.000	8.635	1.600.000.000
				Sub. Keg. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hektar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.740.000	400	40.000.000	500	50.000.000
				Sub. Keg. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase izin usaha pertanian**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**1**	**75.000.000**	**2**	**100.000.000**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA 2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Keg. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Kabupaten/Kota	**Persentase usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**2**	**75.000.000**	**3**	**100.000.000**
				Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina danDiawasi	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	75.000.000	1	100.000.000
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Peningkatan Produktivitas Pertanian**				**N/A**		**N/A**		**9.036.567.862**		**7.613.198.653**		**8.660.428.450**
					Padi	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Jagung	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Kedelai	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Cabe besar	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Cabe rawit	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Bawang Merah	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Tembakau	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Tebu	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Kopi	**Persen**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Luas lahan pertanian yang menerapkan teknologi tepat guna spesifik lokasi**	**Hektar**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**140**	**9.036.567.862**	**180**	**7.613.198.653**	**230**	**8.660.428.450**
					Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang terbentuk	**BUMP**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Jumlah BPP yang naik kelas	**BPP**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**1**		**1**		**1**	
					Jumlah kelompok tani yang naik kelas	**Poktan**	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**42**		**45**		**50**	
				Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	758.531.712	10	1.325.000.000	14	1.500.000.000
				Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.954.955.350	90	4.548.198.653	120	5.230.428.450
				Sub. Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.444.115.700	115	400.000.000	135	450.000.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.301.700	1	160.000.000	1	200.000.000
				Sub. Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	828.663.400	21	1.180.000.000	23	1.280.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**			**Angka**	**N/A**	**76**	**N/A**	**78**	**N/A**	**73**	**20.883.186.105**	**78**	**24.662.499.000**	**80**	**28.349.150.500**
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100**	**20.883.186.105**	**100**	**24.662.499.000**	**100**	**28.349.150.500**
				Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**Persen**	**N/A**	**100**	**N/A**	**100**	**N/A**	**100**	**91.083.700**	**100**	**218.250.000**	**100**	**250.987.500**
				Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	36.739.500	2	42.250.000	2	48.587.500

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	54.344.200	5	176.000.000	5	202.400.000
				Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100**	**18.108.527.255**	**100**	**21.096.620.000**	**100**	**24.261.563.000**
					Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100**		**100**		**100**	
				Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.108.527.255	2.045	20.787.620.000	2.352	23.905.763.000
				Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4	300.000.000	4	345.000.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	18	9.000.000	18	10.800.000
				Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100**	**10.600.000**	**100**	**12.190.000**	**100**	**14.000.000**
				Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	10.600.000	1	12.190.000	1	14.000.000
				Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	Persen	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100**	**1.057.902.800**	**100**	**1.339.370.000**	**100**	**1.541.600.000**
				Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.340.500	1	25.700.000	1	29.500.000
				Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	176.630.700	4	228.000.000	4	262.000.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	650.540.000	2	725.670.000	2	834.500.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46.826.600	2	54.000.000	2	62.100.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	1	56.000.000	1	66.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66	156.765.000	75	250.000.000	85	287.500.000
				Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100**	**1.217.060.000**	**100**	**1.099.569.000**	**100**	**1.270.000.000**
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	147.000.000	3	169.000.000	3	195.000.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.070.060.000	3	930.569.000	3	1.075.000.000
				Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**85**	**398.012.350**	**85**	**896.500.000**	**85**	**1.011.000.000**
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	28.268.000	1	52.500.000	1	57.500.000
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	54	289.150.350	54	332.500.000	54	382.500.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Target RENSTRA									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	27.344.000	6	450.000.000	6	500.000.000
				Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61	53.250.000	65	61.500.000	70	71.000.000

Keterangan :

*) Kondisi Awal. data Tahun 2022

n.a. Data belum tersedia (*not available*)

1.4. Konsumen Pelayanan

Dinas Pertanian kabupaten Jombang dalam melaksanakan pelayanan juga bekerjasama dengan beberapa stake holder. Hal ini dilaksanakan guna mencapai tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yakni "Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Melalui Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura dan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah".

a. Mitra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

   Dinas Pertanian Kabupaten Jombang juga memiliki mitra dalam pemberian pelayanan yaitu Badan Pusat Statistik berkaitan dengan informasi data pertanian yang dibutuhkan untuk diinformasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan kewenangan Badan Pusat Statistik.

b. Kerjasama Dinas Pertanian

   Kerjasama yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten Jombang antara lain:

   - Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kerjasama penelitian Nomor : 520/1559/415.27/2022 , Nomor : 2066/PKS/ITS/2022 dimana tujuan dari hal ini untuk melakukan penelitian pemetaan potensi lahan pertanian untuk mendukung Sistem Operasional dan Strategis Industri Tani Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.
   - Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan PT. Sinar Makmur Komoditas dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor : 521/3409/415.27/2021, Nomor : 454/539-I/X/2021 tentang dukungan mensukseskan asuransi pertanian program pemerintah melalui jalur kemitraan. Tujuan dari Kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan akses kemudahan kepada petani oleh PARA PIHAK dalam bentuk pendampingan budidaya pertaniain berkelanjutan, pendataan peserta asuransi, sosialisasi produk asuransi, pembayaran premi dan dukungan pasca panen untuk menyerap produksi hasil

panen petani yang pada akhirnya meningkatkan kestabilan produksi dan ketahanan pangan.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Dalam upaya mencapai target atas kinerja sasaran Dinas Pertanian yang diharapkan, terdapat beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat maupun peluang yang akan menjadi pendorong bagi Dinas Pertanian.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Dinas Pertanian ke depan, antara lain:

1. Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung pada lahan-lahan pertanian
2. Belum meluasnya pemanfaatan teknologi budidaya pertanian tepat guna, spesifik lokasi dan berkelanjutan oleh petani.
3. Semakin sering dan meluasnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT/Hama dan penyakit) pada lahan-lahan pertanian
4. Perubahan iklim yang bisa berdampak pada daya dukung lahan, pertumbuhan tanaman dan serangan OPT
5. Semaikin menurunnya jumlah tenaga kerja pada bidang pertanian
6. Kondisi harga produk pertanian yang fluktuatif dan cenderung turun saat panen
7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian
8. Tenaga kerja pertanian yang semakin berkurang
9. Masih terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
10. Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan belum tercukupi secara optimal
11. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan
12. Kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) pertanian belum optimal
13. Kurangnya kapasitas/kualitas sumberdaya manusia (SDM) pegawai Dinas Pertanian (Kantor dan Lapangan), baik terkait kemampuan teknis maupun manajerialnya;
14. Sistem monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai, belum berjalan optimal

Selain tantangan-tantangan di atas, juga terdapat beberapa kondisi di Kabupaten Jombang yang menjadi peluang bagi upaya peningkatan pealayanan Dinas Pertanian, antara lain:

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar
2. Adanya sinergitas dan program dengan OPD terkait
3. Kabupaten Jombang memiliki potensi luas Lahan pertanian yang cukup luas (Sawah seluas 48.724 hektar, tegal seluas 11.932 hektar dan pekarangan seluas 16.666 hektar)
4. Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak dan terorganisasi baik (306 Gapoktan dan 1220 poktan)
5. Kebutuhan dunia akan pangan meningkat
6. Mulai berkembangnya skim permodalan yang ramah bagi usaha pertanian
7. Semakin besarnya ketersediaan alsintan dalam rangka mekanisasi pertanian
8. Berkembangnya antusias pelaku usaha sektor pertanian dalam menjalin kemitraan dengan kelembagaan petani
9. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Inventarisasi Permaslahan Dinas Pertanian Tahun 2024

Kabupaten/Kota : Kabupaten Jombang								
No	**Arah Permasalahan pada SKPD**	**Rumusan Masalah**	**Fokus Permasalahan dan Alternatif Solusi Program/Kegiatan 2022**				**Rumusan & Kwantifikasi Masalah 2022**	
			Usulan Solusi Program	**Usulan Solusi Kegiatan**	**Usulan Solusi Sub Kegiatan**	**Rincian Kegiatan yang diusulkan**	**Lokasi (Kecamatan)**	**Indikator Kwantitatif (%, Ton, m, dll)**
	Perkebunan	Ketersediaan sarana pertanian, khususnya alsintan masih belum memadai - Sarana/Alsin olah tanah, baru tersedia 68,47% - Sarana/Alsin tanam, baru tersedia 36,51% - Sarana/Alsin panen, baru tersedia 13,04% - Sarana/Alsin pengairan baru tersedia 37,95%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Pembangunan jalan perkebunan kawasan tembakau - Pembangunan irigasi perkebunan kawasan tembakau - Bantuan pupuk tembakau - Bantuan alsin tembakau	5 Kecamatan (Kabuh, Kudu, Ngusikan, Ploso, Plandaan)	- Pembangunan jalan perkebunan kawasan tembakau 679 meter - Pembangunan irigasi perkebunan kawasan tembakau 608 meter - Bantuan sarana dan alsin tembakau 109 unit
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Bantuan Alsintan - Bantuan benih padi - Bantuan Pupuk organik padat - Bantuan Pupuk organik cair - Fasilitasi Pupuk bersubsidi	21 Kecamatan	- Bantuan Alsintan 30 unit - Bantuan benih padi 17.107 kg - Bantuan Pupuk organik padat 4.900 kg - Bantuan Pupuk organik cair 45.000 liter - Fasilitasi Pupuk bersubsidi 1.220 dok RDKK
	Pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			

Kabupaten/Kota : Kabupaten Jombang

No	Arah Permasalahan pada SKPD	Rumusan Masalah	Fokus Permasalahan dan Alternatif Solusi Program/Kegiatan 2022				Rumusan & Kwantifikasi Masalah 2022	
			Usulan Solusi Program	Usulan Solusi Kegiatan	Usulan Solusi Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan yang diusulkan	Lokasi (Kecamatan)	Indikator Kwantitatif (%, Ton, m, dll)
		Persentase Kecamatan yang memiliki database prasarana pertanian 28,6%			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah dokumen perkembangan prasarana pertanian yang disusun	Semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perkembangan prasarana pertanian 1 dokumen
		Persentase Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dalam kondisi baik 31,69%		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	- Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ direhabilitasi di kawasan agropolitan - Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ direhabilitasi di kawasan non agropolitan	Desa Brangkal-Bandar KM, Desa Senden-Peterongan, Desa Tugusumberjo - Peterongan, Desa Plosokerep-Sumobito, Desa Tinggar-Bandar KM	- Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ direhabilitasi di kawasan agropolitan 55,56 m - Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ direhabilitasi di kawasan non agropolitan 598,89 m
		Persentase Jalan Usaha Tani (JUT) 31,69 %			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	- Panjang JUT yang terbangun/ terehabilitasi di kawasan agropolitan - Panjang JUT yang terbangun/ terehabilitasi di kawasan non agropolitan	Desa Kendalsari-Sumobito, Desa bendungan-Kudu, Desa Mojoduwur-Mojowarno, Desa Sukosari-Kec. Jogoroto, Desa Watudakon-Kesamben	- Panjang JUT yang terbangun/ terehabilitasi di kawasan agropolitan 917 m - Panjang JUT yang terbangun/ terehabilitasi di kawasan non agropolitan 2.750 m
		Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (P-APBD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang direhabilitasi	BPP Bareng, BPP Diwek, BPP Jogoroto, BPP Kesamben, BPP Kudu, BPP Ngoro, dan BPP Perak	Jumlah BPP yang direhabilitasi 7 Unit
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Pembangunan green house di desa Plosokerep-Sumobito	Jumlah Prasarana lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 1 unit
		Usaha perrtanian yang mendapat pembinaan perizinan 2,48%	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan	Pembinaan dan pengembangan PUAP menuju legalitas LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)	Jumlah usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan 15 usaha pertanian
		Luas lahan pertanian yang menerapkan teknologi tepat guna spesifikasi lokasi 180 hektar	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah keragaan budidaya pertanian di BPP	Saprodi keragaan BPP (pelatihan tematik)	- Jumlah keragaan budidaya pertanian di BPP 6 keragaan

Kabupaten/Kota : Kabupaten Jombang								
No	**Arah Permasalahan pada SKPD**	**Rumusan Masalah**	**Fokus Permasalahan dan Alternatif Solusi Program/Kegiatan 2022**				**Rumusan & Kwantifikasi Masalah 2022**	
			Usulan Solusi Program	**Usulan Solusi Kegiatan**	**Usulan Solusi Sub Kegiatan**	**Rincian Kegiatan yang diusulkan**	**Lokasi (Kecamatan)**	**Indikator Kwantitatif (%, Ton, m, dll)**
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Gapoktan temu usaha - Jumlah Gapoktan yang melaksanakan rantai nilai - Jumlah KWT peserta pelatihan teknis dan manajemen kelembagaan - Jumlah peserta pelatihan saka taruna bumi/ pemuda tani - Jumlah Poktan/Gapoktan/ Askom dan stake holder peserta FGD persiapan turun tanam - Jumlah produksi pertanian yang difasilitasi promosi pemasaran	Semua kecamatan	- Jumlah Gapoktan temu usaha = 10 Gapoktan - Jumlah Gapoktan yang melaksanakan rantai nilai = 1 Gapoktan - Jumlah KWT peserta pelatihan teknis dan manajemen kelembagaan = 5 KWT - Jumlah peserta pelatihan saka taruna bumi/ pemuda tani = 26 Orang - Jumlah Poktan/Gapoktan/ Askom dan stake holder peserta FGD persiapan turun tanam = 22 Poktan/Gapoktan/Askom - Jumlah produksi pertanian yang difasilitasi promosi pemasaran = 1 produk
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Jumlah demplot tanaman pangan di Poktan - Jumlah peserta SLHortikultura - Jumlah SL tanaman pangan - Jumlah peserta SL Perkebunan	Semua kecamatan	- Jumlah demplot tanaman pangan di Poktan = 4 demplot - Jumlah peserta SLHortikultura = 40 orang - Jumlah SL tanaman pangan = 20 orang - Jumlah peserta SL Perkebunan = 40 orang

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan tersebut diatas maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Faktor penghambat pelayanan Dinas Pertanian adalah :

1. Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung pada lahan-lahan pertanian
2. Belum meluasnya pemanfaatan teknologi budidaya pertanian tepat guna, spesifik lokasi dan berkelanjutan oleh petani.

3. Semakin sering dan meluasnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT/Hama dan penyakit) pada lahan-lahan pertanian
4. Perubahan iklim yang bisa berdampak pada daya dukung lahan, pertumbuhan tanaman dan serangan OPT
5. Semaikin menurunnya jumlah tenaga kerja pada bidang pertanian
6. Kondisi harga produk pertanian yang fluktuatif dan cenderung turun saat panen
7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian
8. Tenaga kerja pertanian yang semakin berkurang
9. Masih terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
10. Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan belum tercukupi secara optimal
11. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan
12. Kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) pertanian belum optimal
13. Kurangnya kapasitas/kualitas sumberdaya manusia (SDM) pegawai Dinas Pertanian (Kantor dan Lapangan), baik terkait kemampuan teknis maupun manajerialnya;
14. Sistem monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai, belum berjalan optimal.

Sedangkan faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanian adalah :

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar
2. Adanya sinergitas dan program dengan OPD terkait
3. Kabupaten Jombang memiliki potensi luas Lahan pertanian yang cukup luas (Sawah seluas 48.724 hektar, tegal seluas 11.932 hektar dan pekarangan seluas 16.666 hektar)
4. Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak dan terorganisasi baik (306 Gapoktan dan 1220 poktan)
5. Kebutuhan dunia akan pangan meningkat
6. Mulai berkembangnya skim permodalan yang ramah bagi usaha pertanian
7. Semakin besarnya ketersediaan alsintan dalam rangka mekanisasi pertanian

8. Berkembangnya antusias pelaku usaha sektor pertanian dalam menjalin kemitraan dengan kelembagaan petani
9. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan.

3.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang meliputi :

1. Ketersediaan sarana dan alat mesin pertanian yang belum memadai;
2. Ketersediaan prasarana pertanian yang belum memadai;
3. Belum adanya aturan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
4. Serangan Organisme pengganggu tanaman (OPT)/ hama dan bencana pertanian masih sering terjadi akibat perubahan iklim dan ketidakseimbangan ekosistem;
5. Usaha Pertanian yang memiliki legalitas usaha masih minim;
6. Penerapan teknologi budidaya pertanian yang belum optimal;
7. Kelembagaan penyuluhan (BPP) belum berperan maksimal;
8. Kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan/dll) belum maju, mandiri dan modern.

Dalam menjawab berbagai tantangan kedepan dengan adanya isu-isu strategis maka diperlukan strategi dan kebijakan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Digambarkan dalam table dibawah ini

Tabel 3.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Melalui Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan	1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
	dan Hortikultura	2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;	Pengembangan Prasarana Pertanian;
		3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;	Pembangunan Prasarana Pertanian;
		4	Perizinan Usaha Pertanian;	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
		5	Penyuluhan Pertanian.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Tabel 3.3.
Telaah Rencana Strategis Kementrian Pertanian dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula	1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian (0,39 hektar); 2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan; 3. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;	1. Tingginya alih fungsi/konversi lahan pertanian 2. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global 3. Belum optimalnya tingkat kesuburan lahan 4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian (irigasi tingkat Usaha Tani (JITUT),	1. Adanya sinergitas dan program dengan OPD terkait 2. Lahan pertanian yang luas 3. Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak 4. Kebutuhan pangan meningkat 5. Kebijakan pemilik modal untuk menjalin kemitraan 6. Potensi areal pertanian 7. Tersedianya mekanisasi atau alsintan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor; 5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani; 6. Belum optimalnya kelembagaan petani; 7. Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani .	Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani (JUT)) 5. Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya (alsintan) 6. Lambat/belum optimalnya transfer teknologi kepada petani 7. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani) 8. Masih tingginya tingkat kehilangan produk saat panen 9. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan 10. Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran 11. Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian dan belum terintegrasi	8. Kelembagaan HIPPA/GHIPPA 9. Komitmen pimpinan daerah terhadap kegiatan penyuluhan 10. Tersedianya kelembagaan poktan dan gapoktan 11. Adanya mitra sektor pertanian 12. Terbukanya kerjasama dengan media massa sebagai saran penyuluhan 13. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dalam suatu sistem agribisnis 12. Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis 13. Adanya kecenderungan terjadinya proses levelling off (penyamarataan /penyeragaman kualitas/mutu) pada produk pertanian tanaman pangan 14. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai 15. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani 16. Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani 17. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian 18. Posisi tawar petani masih rendah 19. Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pangan	

Sumber: Renstra Kementrian Pertanian dan Renstra Propinsi Jawa Timur

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komoditas pertanian tanaman pangan utama yang akan dikembangkan meliputi komoditas padi, jagung dan kedelai dengan ditunjang pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura. Pengembangan tanaman padi direncakan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang dan mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu sentra beras di wilayah Jawa Timur.

Rencana Kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dikembangkan di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, sebagian wilayah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Sumobito.

Kegiatan disektor pertanian tanaman pangan khususnya padi akan didukung lahan pertanian sawah beririgasi teknis yang dikonservasi seluas 40,676 untuk mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu sentra beras di Jawa Timur.

Sedangkan untuk tetap mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Jombang hingga 20 tahun ke depan, minimal akan pengembangan tanaman padi akan diarahkan dilahan seluas minimal 36.564 ha. Luas lahan minimal tersebut ditetapkan sebagai luas lahan pertanian abadi di Kabupaten Jombang.

Tanaman pangan hortikultura yang dikembangkan di kawasan pertanian lahan kering meliputi tanaman palawija seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu.

Rencana pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut akan di jabarkan lebih rinci dalam rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten. Rencana pengembangan kegiatan sektor pertanian lihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.4
Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Pertanian
Di Kabupaten Jombang

KEGIATAN PERTANIAN	KOMODITAS UNGGULAN	ARAH PENGEMBANGAN	WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN
Sub Sektor Tanaman Pangan	Padi	Pembentukan Sentra Beras	Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, sebagian wilayah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Sumobito
	Palawija : Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu	Kecukupan bahan baku untuk mendorong terbentuknya agroindustri.	Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Kabuh.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 2009 – 2029, 2009.

Selain itu Kabupaten Jombang juga mengembangkan kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) :

1. SKPP I meliputi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro.
   a) Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi:
   b) Pusat pengembangan komoditas pertanian;
   c) Pusat informasi dan pergudangan;
   d) Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi;
   e) Peningkatan produktivitas pertanian;
   f) Pengembangan agroindustri;
   g) Pengembangan agribisnis: berupa jasa-jasa perbankan/bantuan permodalan untuk pengem-bangan pertanian;
   h) Pengembangan agrowisata berupa perkebunan;

i) Pengembangan fasilitas pendukung wisata.

j) Pengembangan prasarana pertanian, meliputi:

1) Balai penelitian dan pengembangan pertanian;
2) Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian;
3) Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit;
4) Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian;
5) Bank perkreditan/simpan pinjam;
6) Pasar utama hasil kegiatan pertanian;
7) Pusat informasi dan akomodasi wisata.

2. SKPP II Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben.
   a. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan produksi utama pembentukan sentra beras;
   b. Pengembangan prasarana pertanian, yang teridiri dari pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan perkebunan.
3. SKPP II Mojoagung meliputi: Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;
   a. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan pusat koleksi;
   b. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi industri dan pergudangan.

Penentuan hirarki pusat pelayanan kawasan agropolitan yang dikembangkan di Kabupaten Jombang meliputi :

a. Kawasan Penghasil Bahan Baku

   Kawasan penghasil bahan baku adalah kawasan produksi di kawasan perdesaan dengan cakupan wilayah satu desa atau lebih dan ditetapkan mempunyai potensi unggul.

b. Pusat Pengumpul Bahan Baku

   Pusat Pengumpul Bahan Baku adalah pusat kegiatan di kawasan perdesaan yang menjadi pusat koleksi dan distribusi bagi beberapa kawasan produksi.

Pusat pengumpul bahan baku juga sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang secara hierarki terkait dalam sistem pusat kegiatan perkotaaan dan ditetapkan sebagai desa pusat pertumbuhan dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan berupa pasar pengumpul setingkat pasar desa.

c. Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster

Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani beberapa desa yang terkait dalam sebuah sistem agribisnis dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster.

Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster dalam hierarki perkotaan kabupaten adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster.

d. Agropolitan center

Agropolitan Center adalah Pusat Kegiatan SKPP, yang didalam hirarki perkotaan kabupaten adalah Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp). Dalam struktur sistem agropolitan Kabupaten Jombang pusat kegiatan diarahkan di SKPP I, yang meliputi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro.

e. Pusat pasar regional

Pusat Pasar Regional merupakan pusat distribusi skala kabupaten yaitu di Perkotaan Mojoagung. Pada pusat pasar regional agropolitan ini diarahkan dikembangkan beberapa prasarana dan sarana penunjang yang mendukung kegiatan pemasaran regional.

Secara keseluruhan, kegiatan yang dikembangkan pada sistem agropolitan ini meliputi :

a. Kegiatan Produksi Hasil Pertanian, meliputi:
   1. Pertanian tanaman pangan;
   2. Perkebunan dan hortikultura (buah, tanaman obat);
   3. Peternakan;
   4. Perikanan; dan

5. Produksi Hasil Hutan.

b. Agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat WP, dan memungkinkan adanya aglomerasi untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan pelayanan sarana dan prasarana;
c. Agribisnis, yang berlokasi di pusat SKPP dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam kaitan dengan forward linkage dan backward linkage; dan
d. Agrowisata, yang berlokasi baik di kawasan perkotaan maupun pusat perdesaan.

Pengembangan Prasarana wilayah untuk mendukung sistem Agropolitan meliputi :

a. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa peningkatan dari irigasi non-teknis atau ½ teknis ke teknis.
b. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan jaringan antar pusat-pusat desa menuju pusat kegiatan dan jalan usaha tani.
c. Pengembangan jaringan kelistrikan untuk menunjang kegiatan agroindustri pada masing-masing pusat SKPP khususnya dunia industri.
d. Pengembangan sarana pendukung kegiatan sub sektor hulu sampai dengan sub sektor hilir, sarana pengembangan SDM di kawasan agropolitan dan pengembangan kelembagaan di kawasan agropolitan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka pada bab ini tidak memuat Visi dan Misi pembangunan. Hal ini disebabkan karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

Mengingat bahwa Tujuan dan Sasaran RPD harus selaras dengan RPJPD, maka berikut akan direview terlebih dahulu Visi dan Misi RPJPD. Sasaran 5 (tahunan) RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah RPD Kabupaten Jombang 2024-2026 V-2 Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025 yang penjabarannya sebagai berikut :

- Terbangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hakhak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi gobal.

- Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.
- Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
- Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025” yang selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain;

1 Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik;
2 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah;
4 Meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan telaah atas Visi dan Misi dokumen RPJPD Kabupaten Jombang, di atas, dan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan Isu

Strategis Daerah, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang 2024-2026

Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Jombang. Rumusan tujuan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran pembangunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang relevan. Indikator tujuan pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah jangka menengah RPD Kabupaten Jombang 2024-2026 V-4 Kabupaten Jombang 2024-2026 dijabarkan menjadi empat (4) tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik,
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing,
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya.
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

4.1.2 Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Jombanb 2024-2026

Setelah melalui beberapa proses guna menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. Pada Tujuan 1 yaitu "Meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura" dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran yaitu:
   - Meningkatkan pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.
b. Pada Tujuan 2 yaitu "Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi perangkat daerah" dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran yaitu:
   - Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 Target dan Indikator Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
									47.922.386.002				
									24.926.581.518				
Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Melalui Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	**Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura**					**Persen**	**0,20**	**0,30**		**0,35**		**0,40**	
		Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	**Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura**			**Persen**	**1,10**	**1,25**	**7.236.409.000**	**1,30**	**8.188.900.000**	**1,35**	**9.490.980.000**
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai**	**Persen**			**7.236.409.000**		**2.310.000.000**	**0,40**	**2.541.000.000**
					Sarana Olah Tanah	**Persen**	**69,15**	**70,54**		**71,25**		**71,96**	
					Sarana Penanaman	**Persen**	**36,87**	**37,51**		**37,99**		**38,37**	
					Sarana Panen	**Persen**	**13,17**	**13,44**		**13,57**		**13,71**	
					Sarana Pengairan	**Persen**	**38,30**	**39,07**		**39,46**		**39,85**	
				Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah poktan/ Gapoktan yang Mendapatkan Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian**	**Poktan/ Gapoktan**		**120**	**7.236.409.000**	**132**	**2.310.000.000**	**145**	**2.541.000.000**
				Sub. Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	200.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Sub. Keg. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	7.036.409.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai**		**N/A**		**14.373.420.400**		**3.078.000.000**		**3.673.800.000**
					Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	**Persen**	**30,68**	**31,11**		**31,33**		**31,56**	
					Jalan Usaha Tani (JUT)	**Persen**	**32,03**	**35,35**		**37,02**		**38,70**	
				Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Desa yang Mendapatkan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Desa**	**49**	**59**	**174.420.400**	**65**	**198.000.000**	**72**	**217.800.000**
				Sub. Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Laporan	N/A	1	94.480.400	1	110.000.000	1	121.000.000
				Sub. Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	N/A	1	79.940.000	1	88.000.000	1	96.800.000
				Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun**	**Unit**	**23**	**36**	**14.199.000.000**	**40**	**2.880.000.000**	**44**	**3.456.000.000**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tanii yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	7	11	11.499.000.000	12	840.000.000	13	1.008.000.000
				Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	10	2.000.000.000	11	1.200.000.000	12	1.440.000.000
				Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	5	500.000.000	6	600.000.000	6	720.000.000
				Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	10	200.000.000	11	240.000.000	12	288.000.000
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persen**	**N/A**	**20,00**	**816.619.550**	**22,00**	**863.500.000**	**24,20**	**949.900.000**
				Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Luas lahan yang Telah Dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Hektar**			**816.619.550**		**863.500.000**		**949.900.000**
				Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	N/A	6.350	634.983.950	6.985	698.500.000	7.684	768.400.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Sub. Keg. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hektar	N/A	1.000	81.857.100	1.100	55.000.000	1.210	60.500.000
				Sub. Keg. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	N/A	1	99.778.500	1	110.000.000	1	121.000.000
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase Usaha Pertanian yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha**	**Persen**	**1,24**	**6,21**	**40.000.000**	**11,18**	**60.000.000**	**17,80**	**80.000.000**
				Keg. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha Pertanian yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha**	**Laporan**	**8**	**20**	**40.000.000**	**30**	**60.000.000**	**40**	**80.000.000**
				Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	15	40	40.000.000	60	60.000.000	80	80.000.000
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas**	**Persen**		**4,51%**	**2.460.132.568**	**4,92%**	**1.877.400.000**	**5,33%**	**2.246.280.000**
				Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah BPP yang Naik Kelas**	**BPP**	**1**	**1**	**2.460.132.568**	**1**	**1.877.400.000**	**1**	**2.246.280.000**
					Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	**Poktan**	**45**	**55**		**60**		**65**	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Jumlah Poktan yang Memiliki Sekolah Lapang	**Jumlah Poktan yang Memiliki Sekolah Lapang**	**Poktan**		**5**		**10**		**20**	
				Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	N/A	10	1.251.455.373	12	1.200.000.000	14	1.440.000.000
				Sub. keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	N/A	122	476.043.395	134	109.800.000	148	131.760.000
				Sub. Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	N/A	42	171.054.800	46	201.600.000	51	241.920.000
				Sub. Keg. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	1	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000
				Sub. Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	N/A	10	501.579.000	11	300.000.000	12	360.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**					**Indeks**		**71**		**76**		**80,1**	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**			**Angka**		**80**	**22.995.804.484**	**80,5**	**27.478.270.264**	**81**	**32.973.924.317**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur**	**Persen**		**100**	**22.995.804.484**	**100**	**27.478.270.264**	**100**	**32.973.924.317**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun sesuai Aturan**	**Persen**		**100**	**58.784.500**	**100**	**84.000.000**	**100**	**100.800.000**
				Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	32.734.800	3	42.000.000	3	50.400.000
				Sub.keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		5	26.049.700	5	42.000.000	5	50.400.000
				Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**Persen**		**100**	**19.680.816.634**	**100**	**23.688.238.061**	**100**	**28.425.885.673**
					Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan	**Persen**		**100**		**100**		**100**	
				Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		14	19.424.908.634	14	23.309.890.361	14	27.971.868.433
				Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	249.978.000	12	370.800.000	12	444.960.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12	5.930.000	12	7.547.700	12	9.057.240
				Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pelaporan barang milik daerah yang tersusun sesuai aturan**	**Persen**		**100**	**10.600.000**	**100**	**12.720.000**	**100**	**15.264.000**
				Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		12	10.600.000	**12**	12.720.000	**12**	15.264.000
				Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**195.000.000**	**100**	**197.120.000**	**100**	**236.544.000**
				Sub. Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta antribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta antribut kelengkapan	Paket		550	195.000.000	550	197.120.000	550	236.544.000
				Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**Persen**		**100**	**1.258.316.400**	**100**	**1.606.741.680**	**100**	**1.928.090.016**
				Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		12	45.279.500	12	61.056.480	12	73.267.776
				Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	143.004.900	12	174.000.000	12	208.800.000

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	841.480.000	12	1.094.112.000	12	1.312.934.400
				Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	39.030.000	12	36.579.600	12	43.895.520
				Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12	129.250.000	12	120.067.200	12	144.080.640
				Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	60.272.000	12	120.926.400	12	145.111.680
				Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**		**100**	**1.227.800.000**	**100**	**1.332.585.600**	**100**	**1.599.102.720**
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	217.800.000	12	300.585.600	12	360.702.720
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.010.000.000	12	1.032.000.000	12	1.238.400.000
				Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**		**85**	**564.486.950**	**85**	**753.984.923**	**85**	**904.781.908**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2022	Target RENSTRA 2024 K	2024 Rp	2025 K	2025 Rp	2026 K	2026 Rp
				Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		6	40.183.400	12	72.220.080	12	86.664.096
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		51	252.017.550	51	410.786.003	51	492.943.204
				Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung		67	191.986.000	67	174.198.840	67	209.038.608
				Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		67	80.300.000	67	96.780.000	67	116.136.000

Sumber : Dinas pertanian, 2023

4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah

Casceding Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 seperti table dibawah ini:

Tabel 4.2 Cascading Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 (Dinas Pertanian)

TUJUAN	INDIKATOR (5)	SASARAN (16)	INDIKATOR SASARAN (20)	Formula	Realisasi 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM UTAMA	Perangkat Daerah
Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	5. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Invenstasi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Rata-Rata pertumbuhan ADHK kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor R = (R1+R2+R3) / 3 R1 = Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian R2 = Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Industri Pengolahan R3 = Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,0273	0,9727	1,9727	2,9727	3,9727	4,9727				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Petanian
														Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
														Program Penyuluhan Pertanian	
														Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
														Program Perizinan Usaha Pertanian	

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang, 2022

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian mengacu atau selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yakni Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya berbasis Agribisnis. Arah kebijakan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026:

a. Tahun 2024

   Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industry agribisnis dan pembangunan wilayah.

b. Tahun 2025

   Penguatan daya saing sumber daya manusia dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis.

c. Tahun 2026

   Mewujudkan integrasi sektor perdagangan dan industri agribisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya.

Strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Pertanian ditampilkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.1 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
I	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
1	Petani merasa terjadi kelangkaan dan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi	1	Alokasi pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman
2	Tenaga kerja dibidang pertanian semakin menurun	2	Pemanfaatan mekanisasi dalam budidaya pertanian masih belum optimal
3	Perubahan budaya / Tuntutan kemajuan		
4	Ketersediaan prasarana pendukung pertanian yang belum memadai	3	Pemanfaatan lahan pertanian belum maksimal, kondisi bero masih banyak terjadi
5	Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian masih terjadi	4	Belum adanya aturan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
6	Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT/Hama dan penyakit) pada lahan-lahan pertanian masih sering terjadi	5	Perubahan iklim dan ketidaseimbangan ekosistem menyebabkan meledaknya populasi OPT dan bencana pertanian lainnya

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
7	Masih sering terjadi bencana pertanian (banjir, kekeringan) akibat perubahan iklim		
8	Harga komoditas pertanian yang fluktuatif dan cenderung jatuh saat panen raya	6	Kelembagaan petani masih belum mampu untuk mejadi pelaku usaha, khususnya dalam pemasaran
9	Keseimbangan biaya produksi dan pendapatan usaha tani belum tercapai		
10	Kelompok tani masih belum memiliki unit-unit usaha modern yang mendukung kegiatan budidaya pertaniannya	7	Kurangnya kesadaran legalitas (perizinan) dalam berusaha tani
11	Penerapan teknologi pada budidaya pertanian oleh petani masih belum optimal	8	Peningkatan produktivitas pertanian semakin sulit dicapai
12	Peran BPP sebagai pusat kegiatan penyuluhan kurang optimal		
13	Poktan/Gapoktan sebagai wadah organisasi petani kurang berperan optimal		
14	Kesuburan lahan semakin menurun		

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Tabel 5.1 menunjukkan deskripsi permasalahan berdasar urusan dan isu strategis Dinas Pertanian, perlu adanya kebijakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis yang ada dapat dilihat dalam table berikut

Tabel 5.2 Strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Melalui Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
		2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;	Pengembangan Prasarana Pertanian;

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
		3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;	Pembangunan Prasarana Pertanian;
		4	Perizinan Usaha Pertanian;	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
		5	Penyuluhan Pertanian.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sumber: Dinas Pertanian, 2023

Tabel 5.2 menunjukkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang guna mengatasi permasalahan dan isu strategis yang ada meliputi 5 (lima) strategi dan 6 (enam) kebijakan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri ini, berperan strategis dalam proses penyusunan Kembali tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, termasuk didalamnya perubahan terhadap indikator-indikator capaian kinerja. Uraian dan penjabaran program / kegiatan /sub kegiatan dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA 2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					24.926.581.518						
		Persen	0,25	0,30		0,35		0,40		0,40	-
		Persen	1,20	1,25	7.236.409.000	1,30	8.188.900.000	1,35	9.490.980.000	1,35	9.490.980.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai**	**Persen**			**7.236.409.000**		**2.310.000.000**	**0,40**	**2.541.000.000**	**0,40**	**2.541.000.000**
	Sarana Olah Tanah	**Persen**	**69,85**	**70,54**		**71,25**		**71,96**		**71,96**	**-**
	Sarana Penanaman	**Persen**	**37,24**	**37,51**		**37,99**		**38,37**		**38,37**	**-**
	Sarana Panen	**Persen**	**13,31**	**13,44**		**13,57**		**13,71**		**13,71**	**-**
	Sarana Pengairan	**Persen**	**38,68**	**39,07**		**39,46**		**39,85**		**39,85**	**-**
Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah poktan/ Gapoktan yang Mendapatkan Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian**	**Poktan/ Gapoktan**		**120**	**7.236.409.000**	**132**	**2.310.000.000**	**145**	**2.541.000.000**	**145**	**2.541.000.000**
Sub. Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	200.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	**1**	121.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	7.036.409.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	**1**	2.420.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai**		**N/A**		**14.373.420.400**		**3.078.000.000**		**3.673.800.000**	**-**	**3.673.800.000**
	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	**Persen**	**30,90**	**31,11**		**31,33**		**31,56**		**31,56**	**-**
	Jalan Usaha Tani (JUT)	**Persen**	**33,69**	**35,35**		**37,02**		**38,70**		**38,70**	**-**
Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Desa yang Mendapatkan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Desa**	**54**	**59**	**174.420.400**	**65**	**198.000.000**	**72**	**217.800.000**	**72**	**217.800.000**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Laporan	N/A	1	94.480.400	1	110.000.000	1	121.000.000	**1**	121.000.000
Sub. Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	N/A	1	79.940.000	1	88.000.000	1	96.800.000	**1**	96.800.000
Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun**	**Unit**	**10**	**36**	**14.199.000.000**	**40**	**2.880.000.000**	**44**	**3.456.000.000**	**44**	**3.456.000.000**
Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tanii yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	9	11	11.499.000.000	12	840.000.000	13	1.008.000.000	**13**	1.008.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	10	2.000.000.000	11	1.200.000.000	12	1.440.000.000	**12**	1.440.000.000
Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		5	500.000.000	6	600.000.000	6	720.000.000	**6**	720.000.000
Sub. Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		10	200.000.000	11	240.000.000	12	288.000.000	**12**	288.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persen**	**N/A**	**20,00**	**816.619.550**	**22,00**	**863.500.000**	**24,20**	**949.900.000**	**24,20**	**949.900.000**
Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Luas lahan yang Telah Dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Hektar**			**816.619.550**		**863.500.000**		**949.900.000**	**-**	**949.900.000**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	N/A	6.350	634.983.950	6.985	698.500.000	7.684	768.400.000	**7.684**	768.400.000
Sub. Keg. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hektar	N/A	1.000	81.857.100	1.100	55.000.000	1.210	60.500.000	**1.210**	60.500.000
Sub. Keg. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	1	1	99.778.500	1	110.000.000	1	121.000.000	**1**	121.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase Usaha Pertanian yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha**	**Persen**	**2,90**	**6,21**	**40.000.000**	**11,18**	**60.000.000**	**17,80**	**80.000.000**	**17,80**	**80.000.000**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA 2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Keg. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha Pertanian yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha**	**Laporan**	**10**	**20**	**40.000.000**	**30**	**60.000.000**	**40**	**80.000.000**	**40**	**80.000.000**
Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	20	40	40.000.000	60	60.000.000	80	80.000.000	**80**	80.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas**	**Persen**		**4,51%**	**2.460.132.568**	**4,92%**	**1.877.400.000**	**5,33%**	**2.246.280.000**	**5,33%**	**2.246.280.000**
Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah BPP yang Naik Kelas**	**BPP**	**1**	**1**	**2.460.132.568**	**1**	**1.877.400.000**	**1**	**2.246.280.000**	**1**	**2.246.280.000**
	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	**Poktan**	**50**	**55**		**60**		**65**		**65**	**-**
	Jumlah Poktan yang Memiliki Sekolah Lapang	**Poktan**	**2**	**5**		**10**		**20**		**20**	**-**
Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	N/A	10	1.251.455.373	12	1.200.000.000	14	1.440.000.000	**14**	1.440.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	N/A	122	476.043.395	134	109.800.000	148	131.760.000	**148**	131.760.000
Sub. Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	N/A	42	171.054.800	46	201.600.000	51	241.920.000	**51**	241.920.000
Sub. Keg. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	1	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	**1**	72.600.000
Sub. Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	2	10	501.579.000	11	300.000.000	12	360.000.000	**12**	360.000.000
		Indeks		**71**		**76**		**80**		**80**	**-**
		Angka		**80**	**22.995.804.484**	**80,5**	**27.478.270.264**	**81**	**32.973.924.317**	**81**	**32.973.924.317**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur**	**Persen**	100	**100**	**22.995.804.484**	**100**	**27.478.270.264**	**100**	**32.973.924.317**	100	**32.973.924.317**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun sesuai Aturan**	**Persen**	100	**100**	**58.784.500**	**100**	**84.000.000**	**100**	**100.800.000**	100	**100.800.000**
Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	32.734.800	3	42.000.000	3	50.400.000	3	50.400.000
Sub.keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	26.049.700	5	42.000.000	5	50.400.000	5	50.400.000
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**Persen**	100	**100**	**19.680.816.634**	**100**	**23.688.238.061**	**100**	**28.425.885.673**	100	**28.425.885.673**
	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan	**Persen**	100	**100**		**100**		**100**		100	**-**
Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	19.424.908.634	14	23.309.890.361	14	27.971.868.433	14	27.971.868.433
Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	249.978.000	12	370.800.000	12	444.960.000	12	444.960.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	5.930.000	12	7.547.700	12	9.057.240	12	9.057.240
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pelaporan barang milik daerah yang tersusun sesuai aturan**	**Persen**	100	**100**	**10.600.000**	**100**	**12.720.000**	**100**	**15.264.000**	100	**15.264.000**
Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	10.600.000	**12**	12.720.000	**12**	15.264.000	12	15.264.000
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**195.000.000**	**100**	**197.120.000**	**100**	**236.544.000**	100	**236.544.000**
Sub. Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta antribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta antribut kelengkapan	Paket	550	550	195.000.000	550	197.120.000	550	236.544.000	550	236.544.000
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**Persen**	100	**100**	**1.258.316.400**	**100**	**1.606.741.680**	**100**	**1.928.090.016**	100	**1.928.090.016**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	45.279.500	12	61.056.480	12	73.267.776	12	73.267.776
Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	143.004.900	12	174.000.000	12	208.800.000	12	208.800.000
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	841.480.000	12	1.094.112.000	12	1.312.934.400	12	1.312.934.400
Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	39.030.000	12	36.579.600	12	43.895.520	12	43.895.520
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	129.250.000	12	120.067.200	12	144.080.640	12	144.080.640
Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	60.272.000	12	120.926.400	12	145.111.680	12	145.111.680
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	100	**100**	**1.227.800.000**	**100**	**1.332.585.600**	**100**	**1.599.102.720**	100	**1.599.102.720**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	217.800.000	12	300.585.600	12	360.702.720	12	360.702.720
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.010.000.000	12	1.032.000.000	12	1.238.400.000	12	1.238.400.000
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	85	**85**	**564.486.950**	**85**	**753.984.923**	**85**	**904.781.908**	85	**904.781.908**
Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	40.183.400	12	72.220.080	12	86.664.096	12	86.664.096
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	51	252.017.550	51	410.786.003	51	492.943.204	51	492.943.204

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian 2023	Target RENSTRA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2026	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung	67	67	191.986.000	67	174.198.840	67	209.038.608	67	209.038.608
Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	67	67	80.300.000	67	96.780.000	67	116.136.000	67	116.136.000

Sumber: Dinas Pertanian, 2023

Dari table 6.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdiri 6 (enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 37 (Tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan beserta besaran pagu anggaran pada masing-masing sasaran perangkat daerah dimana untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan , pertama Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura besar pagu untuk tahun 2024 setelah ditambah mandatory dan pokir sebesar Rp 24.926.581.518,- . Kedua meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Perangkat daerah sebesar Rp 22.995.804.484,-.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdiri atas 2 (dua) indikator, pertama laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan. Perkebunan dan hortikultura. Kedua Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan utama dalam pencapaian kinerja dan pengendalian serta evaluasi dokumen perencanaan Dinas Pertanian maka disusun Kinerja Dinas Pertanian. Kinerja diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja bersifat berjenjang, di mana jenjang yang tertinggi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian Indikator Individu Daerah (IKI) yang berada di bawahnya, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan hingga Indikator Kinerja Sub Kegiatan. IKU merupakan ukuran kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan dan merupakan indikator capaian akhir (*impact*) atau tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Pada dokumen RPD, IKU merupakan indikator tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, sebagaimana telah tertuang dalam Bab V dokumen RPD ini.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pertanian Kabupaten jombang bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik;
b. Memperoleh ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dipergunakan untuk:

a. Perencanaan jangka menengah;
b. Perencanaan tahunan;
c. Pengukuran kinerja secara berkala;
d. Pelaporan kinerja; dan
e. Evaluasi kinerja.

Secara detil target IKU Dinas Pertanian Kabupaten Jombang periode 2024-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	$\frac{\text{Produksi tahun N} - \text{Produksi tahu}}{\text{Produksi tahun (N} - 1)} \times 100\%$	BPS, Dinas Pertanian
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian pada Tahun N	Tim Evaluasi AKIP Pemkab Jombang

Sumber : Dinas Pertanian

Tabel diatas menunjukkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang meliputi kinerja, indicator kinerja, formulasi/rumus perhitungan dan sumber data.

Penentuan target pertumbuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Mengacu pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwasannya indikator kinerja kunci outcome/hasil pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan produktivitas pertanian per hektar per tahun. Dimana indikator kinerja kunci output/keluaran meliputi:

1. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan;
2. Prasarana pertanian yang digunakan;
3. Penerbitan izin usaha pertanian;

4. Persentase prasarana yang digunakan;
5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota.

b. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang perlu guna memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode 2024-2026 tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Penyajian IKU dan IKD dalam dokumen RPD menjadi pijakan dalam penyusunan target pembangunan tahunan dan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara detil target IKU dan IKD Kabupaten Jombang periode 2024-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Pada tahun 2022 capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jombang adalah 0,47 dengan tingkat kapasitas daerah Sedang dengan capaian sebagaimana data berikut ini:

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL*	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	Indeks Good Governance	Indeks	74,01	76,00	78,00	80,00	80,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,05	75,01	75,49	75,97	75,97
3	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	84,99	85,21	86,51	87,39	87,39
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	*5,45 – 5,65*	*5,65 – 5,77*	*5,77 – 5,85*	*5,77 – 5,85*
5	Indeks Gini	Indeks	0,310	0,305	0,300	0,295	0,295
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,08	8,90	8,70	8,50	8,50
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,47	5,04	4,84	4,65	4,65
8	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	Indeks	61,73	69,17	71,21	74,14	74,14

Keterangan :

*) Kondisi Awal. data Tahun 2022

Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR AKHIR
				2024	2025	2026	
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
I.1	***Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi***						
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	*5,45 – 5,65*	*5,65 – 5,77*	*5,77 – 5,85*	*5,77 – 5,85*
2	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,305	0,3	0,295	0,295
I.2	***Fokus Kesejahteraan Sosial***						
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,33	75,01	75,49	75,97	75,97
4	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	84,99	85,21	86,51	87,39	87,39
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,04	9,97	9,96	9,95	9,95
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,47	5,04	4,84	4,65	4,65
7	Indeks Good Governance	Indeks	74,01	76	78	80	80
8	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	Indeks	61,73	69,17	71,21	74,14	74,14
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
2.1	***Fokus Layanan Umum Pemerintahan Wajib***						
A	***Urusan Pendidikan***						
1	**Indeks Pendidikan**	Indeks	66,92	67,5	68	68,5	68,5
B	***Urusan Kesehatan***						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR AKHIR
				2024	2025	2026	
2	**Indeks Kesehatan**	Indeks	0,813	0,8142	0,8161	0,818	81,818
C	***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***						
3	**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	Indeks	0,7433	0,7521	0,7648	0,7721	0,7721
D	***Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman***						
4	**Indeks Infrastruktur Permukiman**	Indeks	0,7669	0,7688	0,8043	0,8534	0,8534
E	***Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat***						
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	75	77,5	80	82,5	82,5
6	Persentase Penurunan konflik IPOLEKSOSBUD	Persen	*0*	0	0	0	0
7	**Indeks Risiko Bencana**	Indeks	110,18	105	100	95	95
F	***Urusan Sosial***						
8	**Indeks Kesejahteraan Sosial**	Indeks	n.a.	75,5	80	85	85
G	***Urusan Tenaga Kerja***						
9	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	Persen	*66,65*	*71,92*	*72,22*	*72,52*	72,52
H	***Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***						
10	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	Indeks	n.a	74,75	75,15	76,28	76,28

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR AKHIR
				2024	2025	2026	
I	***Urusan Lingkungan Hidup***						
11	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Indeks	58,41	58,7	59,11	60,02	60,02
J	***Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***						
12	**Jumlah Desa Mandiri**	Desa Mandiri	47	*54*	*58*	*62*	62
K	***Urusan Penanaman Modal***						
13	**Persentase Peningkatan Realisasi Investasi**	Persen	4,92	*5*	*5,1*	*5,2*	5,2
L	***Urusan Kebudayaan***						
14	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	61	64	67	70	70
2.2	***Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan***						
M	***Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, dan Urusan Industri***						
15	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan**	Persen	3,25	3,28	3,32	3,35	3,35
N	***Urusan Pariwisata***						
16	**Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	Persen	*61,54*	*15*	*16,5*	*18*	18
O	***Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***						
17	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	*61,81*	*62*	*63,45*	*65*	65

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR AKHIR
				2024	2025	2026	
III	**ASPEK DAYA SAING**						
3.1	***Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah***						
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	*5,45 – 5,65*	*5,65 – 5,77*	*5,77 – 5,85*	*5,77 – 5,85*
3.2	***Fokus Fasilitasi Wilayah / Infrastruktur***						
2	Indeks Infrastruktur Permukiman	Indeks	0,7669	0,7688	0,8043	0,8534	0,8534
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,41	58,7	59,11	60,02	60,02
3.3	***Fokus Iklim Berinvestasi***						
4	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persen	4,92	*5*	*5,1*	*5,2*	5,2
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,18	105	100	95	95
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	75	77,5	80	82,5	82,5
3.4	***Fokus Sumberdaya Manusia***						
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,05	75,01	75,49	75,97	75,97

Keterangan :

*) Kondisi Awal. data Tahun 2022

n.a. Data belum tersedia (*not available*)

7.2 Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui indikator Kinerja Kunci

a. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten Jombang seperti pada table sebagai berikut:

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci Outcome (Hasil) Dan Output (Keluaran) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Lppd Tahun 2022

Urusan	IKK Outcome / Hasil	IKK Output / Keluaran	KETERANGAN
1	2	3	4
PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Data produksi yang digunakan hanya data capaian tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi-ubian
		1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Merupakan penjumlahan dari seluruh sarana (alat mesin pertanian, pupuk, benih, bibit, dan pestisida) dan prasarana (jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jalan usaha tani)
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	Data prasarana yang digunakan merupakan data capaian pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	Fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian adalah melalui pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian
		4. Persentase prasarana yang digunakan	Data yang digunakan merupakan capaian pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan usaha pertanian adalah jumlah usaha pertanian yang mengajukan izin usaha melalui aplikasi OSS

Sumber : https://lppd.jombangkab.go.id

b. Mandatory

Tindaklanjut dari Kegiatan Strategis Daerah (utamanya yang membutuhkan kolaborasi/sinergitas dengan PD/stakeholder) bagi Dinas Pertanian sebagai Organisasi Perangkat Daerah pendukung untuk Desa Mandiri Pangan dan Bio Energi (Demapan bener). Leading Sector adalah Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk menyusun konsep Desa Mandiri Pangan dan Bio Energi sebagai bahan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dengan mengundang OPD pendukung, yang meliputi gambaran desa mapan bener, mapping potensi yang sudah ada di lokus pilot project, kebutuhan sarpras pendukung, Berbagi Peran antar OPD sesuai dengan tupoksi/kewenangan (termasuk pada antar bidang di internal DKPP), Mapping eksekusi kebutuhan sarpras pendukung (Reguler 2023 mulai inisiasi pembinaan, PAPBD thn. 2023, Reguler thn. 2024), Timeline/tahapan mulai tahun 2023 sampai dengan launching Desa Mapan Bener Tahun 2024. Mandatory demapan bener Dinas Pertanian seperti table berikut:

Tabel 7.4 Kebutuhan Mandatory Demapan 2024 Dinas Pertanian

SUB KEGIATAN	JUMLAH USULAN ANGGARAN	SUDAH MASUK RENJA (RP)	BELUM MASUK RENJA (RP)
a	*b=(c+d)*	*c*	*d*
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	200.000.000	-	200.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	281.756.000	281.756.000	-
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	351.579.000	351.579.000	-

Sumber : Dinas Pertaniana, 2023

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tiga tahun (2024-2026) dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 ini, disusun sinergis dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah serta mendasarkan pada kebijakan-kebijakan yang berkembang selama periode 2018-2023. Dengan mendasarkan pada hasil evaluasi realisasi tahun 2018-2020 dan dokumen perencanaan tahunan yang disusun pada tahun 2019-2021.

Diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari Renstra ini dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, hasil-hasil dari kegiatan pembangunan pertanian pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh petani di Kabupaten Jombang.